

Peran Pajak Pertambahan Nilai dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Publik

Adelia Syahputri Sinaga¹, Melisa Kristina Sarumpaet², Elsa Clarisa Purba³, Alda Belend Candita br Tarigan⁴

^{1,2,3,4} Universitas Prima Indonesia

adeliasinaga41@gmail.com¹, Melisakristina546@gmail.com², elsaclarissa3@gmail.com³, aldavivo658@gmail.com⁴

Article Info:

Article history:

Received Date: 03/07/2025

Accepted Date: 23/12/2025

Published Date: 09/01/2026

Keywords:

VAT Contribution

Allocation Policy

Development Impact

ABSTRACT

Value Added Tax (VAT) is one of the main sources of state revenue that supports financing for public infrastructure development in Indonesia. VAT is a type of indirect tax imposed on every transaction of buying and selling goods and services. This study aims to analyze the contribution of VAT to infrastructure funding, the policy of allocating VAT revenue for public development, and the impact of infrastructure development on the national economy. The method used in this study is through an in-depth literature review, collecting data from scientific articles, policy reports, annual reports of the Directorate General of Taxes, the Central Statistics Agency, and government policy publications. The results of the study show that VAT makes a significant contribution to funding infrastructure projects, which leads to increased economic productivity, job creation, and equitable development between regions. This study concludes that optimal VAT management can accelerate infrastructure development and improve the quality of the national economy.

This is a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License
(CC BY-NC 4.0)

Corresponding Author:

Adelia Syahputri Sinaga
Universitas Prima Indonesia
adeliasinaga@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai mampu memperlancar mobilitas barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, meningkatkan produktivitas ekonomi, serta memperkuat konektivitas antarwilayah. Di Indonesia, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas nasional karena memiliki peran strategis dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Berbagai proyek infrastruktur seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, bendungan, jaringan listrik, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan memerlukan dukungan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan.

Salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur berasal dari penerimaan perpajakan. Pajak berfungsi sebagai instrumen fiskal yang memungkinkan pemerintah memperoleh sumber pendanaan untuk membiayai pengeluaran publik, termasuk pembangunan infrastruktur. Dalam struktur penerimaan negara Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan perpajakan nasional. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara konsisten menjadi penyumbang terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPH)

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PPN memiliki peran penting dalam mendukung kapasitas fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Peningkatan penerimaan PPN menjadi semakin penting setelah pemerintah menerapkan kebijakan penyesuaian tarif PPN sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperluas ruang fiskal pemerintah sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, efektivitas pemanfaatan penerimaan PPN dalam mendukung pembangunan infrastruktur masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, praktik penghindaran pajak, keterbatasan basis pajak, serta belum optimalnya efisiensi pengelolaan dan alokasi anggaran pembangunan.

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara penerimaan pajak dan pembangunan infrastruktur. Penelitian oleh Simamora et al. (2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui peningkatan kapasitas fiskal pemerintah. Purwitasari et al. (2024) menemukan bahwa penerimaan pajak berkontribusi positif terhadap investasi infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara itu, Panjaitan et al. (2020) menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui peningkatan produktivitas dan konektivitas wilayah. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada peran pajak secara umum terhadap pembangunan infrastruktur dan belum secara spesifik mengkaji mekanisme kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai salah satu sumber penerimaan utama negara dalam mendukung pembangunan infrastruktur publik.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang perlu ditelaah lebih lanjut. Pertama, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji kontribusi PPN terhadap pembangunan infrastruktur publik melalui perspektif kebijakan alokasi penerimaan negara. Kedua, penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek penerimaan pajak secara agregat tanpa menjelaskan hubungan antara peningkatan penerimaan PPN, efektivitas pengalokasian anggaran, dan dampaknya terhadap pembangunan infrastruktur. Ketiga, perkembangan kebijakan perpajakan terbaru, termasuk penyesuaian tarif PPN dan digitalisasi administrasi perpajakan, memerlukan kajian yang lebih komprehensif mengenai implikasinya terhadap pembiayaan pembangunan publik.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada analisis komprehensif mengenai kontribusi PPN terhadap pembangunan infrastruktur publik melalui tiga dimensi utama, yaitu kontribusi penerimaan PPN terhadap kapasitas fiskal negara, kebijakan alokasi penerimaan PPN dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, serta dampak pembangunan infrastruktur yang didukung oleh penerimaan PPN terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan pendekatan kajian literatur yang sistematis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai optimalisasi peran PPN dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kontribusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembiayaan pembangunan infrastruktur publik di Indonesia, mengkaji kebijakan alokasi penerimaan PPN dalam pembangunan infrastruktur, serta mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur yang didukung oleh penerimaan PPN terhadap perekonomian nasional.

2. TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS PENELITIAN

VAT Contribution (Kontribusi PPN)

(Podungge et al., 2024) menyatakan bahwa PPN merupakan sumber penerimaan penting yang memungkinkan pemerintah membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. PPN juga membantu menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan mendorong transparansi serta kepatuhan pajak di seluruh rantai produksi dan distribusi barang dan jasa. Namun, narasumber juga mengingatkan bahwa kenaikan PPN harus diimbangi dengan kebijakan sosial agar tidak memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah.

PPN merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. Menurut (Hajatina & Hasanah, 2024), PPN dan PPnBM merupakan salah satu sumber penerimaan pajak terbesar di Indonesia dengan kontribusi sekitar 43,2% terhadap target penerimaan pajak dalam APBN 2025. Besarnya kontribusi tersebut menunjukkan bahwa PPN memiliki peran strategis dalam mendukung kapasitas fiskal negara. Peningkatan penerimaan dari sektor ini berpotensi memperluas ruang fiskal pemerintah untuk membiayai berbagai program pembangunan, termasuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur publik.

Allocation Policy (Kebijakan Alokasi)

Menurut (Hidayat & Ramadhani, 2021) struktur perpajakan yang efektif memungkinkan pemerintah menyediakan layanan publik yang lebih baik, termasuk infrastruktur. Di Indonesia, (Kementerian Keuangan, 2022) melaporkan bahwa PPN merupakan kontributor terbesar kedua dalam struktur penerimaan perpajakan nasional. Sebagian dari penerimaan PPN dialokasikan dalam belanja negara untuk pembangunan fisik, seperti jalan tol, bendungan, sarana transportasi, dan fasilitas pendidikan maupun kesehatan. Penelitian oleh (Aulia et al., 2025) menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan PPN secara signifikan memengaruhi besarnya anggaran pembangunan infrastruktur. Hal ini diperkuat oleh hasil studi empiris di beberapa negara berkembang yang menunjukkan korelasi positif antara optimalisasi penerimaan PPN dan peningkatan output infrastruktur publik (Larosa & Halawa, 2024)

Penelitian oleh (Purwitasari et al., 2024) menunjukkan bahwa penerimaan pajak, khususnya PPN, memiliki korelasi positif dengan investasi infrastruktur. Infrastruktur yang didanai oleh pajak meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka akses pasar yang lebih luas. Namun, kenaikan tarif PPN juga dapat menaikkan biaya konstruksi akibat eskalasi harga bahan dan jasa, sebagaimana diungkapkan oleh (Kementerian Keuangan, 2022).. Menurut (Wibowo, 2023), Belum optimalnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan pengelolaan anggaran yang kurang transparan menjadi kendala utama dalam memaksimalkan kontribusi pajak terhadap pembangunan infrastruktur. Diperlukan reformasi perpajakan dan edukasi masyarakat agar penerimaan PPN dapat digunakan secara efektif dan efisien.

Development Impact (Dampak Pembangunan)

(Prasetyo & Firdaus, 2021) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang baik menjamin efisiensi, memperlancar pergerakan barang dan jasa, serta meningkatkan nilai tambah perekonomian. Infrastruktur juga menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru. (Hendra Andy Mulia Panjaitan et al., 2020) mengemukakan bahwa infrastruktur merupakan faktor penentu daya saing dan produktivitas ekonomi. Infrastruktur ekonomi berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan regional, sementara infrastruktur sosial berdampak pada kualitas hidup dan modal manusia yang berpengaruh jangka panjang. Pembangunan infrastruktur memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian nasional Indonesia, antara lain: memacu pertumbuhan ekonomi Infrastruktur yang memadai meningkatkan efisiensi mobilitas barang dan jasa, memperlancar aktivitas ekonomi, serta memperkuat basis ekonomi nasional.

Hal ini mendorong peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta inklusif, yang juga membantu menurunkan kemiskinan dan pengangguran. Meningkatkan konektivitas antarwilayah seperti pembangunan jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara mempercepat distribusi barang dan jasa, membuka akses ke daerah terpencil, dan memperkuat integrasi ekonomi antar daerah. Ini meningkatkan daya saing wilayah dan memperluas jaringan perdagangan domestik dan internasional. Mendorong investasi infrastruktur yang berkualitas menciptakan iklim bisnis yang kondusif, menarik investasi domestik maupun asing, dan meningkatkan kapasitas produksi nasional. Investasi sektor swasta meningkat sebagai respons terhadap kemudahan yang diberikan oleh infrastruktur. Menciptakan lapangan kerja proses pembangunan infrastruktur dan operasionalnya membuka peluang kerja baru, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga membantu mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Infrastruktur publik seperti sekolah, rumah sakit, air bersih, dan listrik meningkatkan akses layanan dasar, yang pada gilirannya memperbaiki standar hidup dan produktivitas masyarakat. Mendukung pemerataan ekonomi dengan membuka akses ke daerah-daerah kurang berkembang, infrastruktur membantu pemerataan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi antar wilayah. Namun, pembangunan infrastruktur juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti relokasi masyarakat, kerusakan lingkungan, dan tekanan fiskal jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perencanaan dan pengelolaan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sangat diperlukan agar manfaatnya maksimal dan dampak negatif dapat diminimalisasi. Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur merupakan

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur untuk menganalisis peran pajak dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Sumber informasi yang dikumpulkan untuk penelitian ini berasal dari laporan kebijakan, dokumen resmi yang relevan, laporan kebijakan, laporan tahunan direktorat Jenderal Pajak (DJP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, jurnal dan berbagai artikel ilmiah yang menggunakan database akademik seperti Google Scholar dan JSTOR. Hanya sumber yang dianggap dapat diandalkan dan terkini, dalam

kurun waktu 10 tahun terakhir, yang dimasukkan dalam kajian ini. Analisis konten dilakukan untuk mengidentifikasi tema-tema kunci, dengan membandingkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber. Selain itu, beberapa studi kasus proyek infrastruktur yang berhasil didanai melalui pajak juga dianalisis untuk memberikan contoh konkret tentang kontribusi pajak terhadap pembangunan dan tantangan yang dihadapi. Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi untuk pembuat kebijakan disusun untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam mengenai hubungan antara pajak dan pembangunan infrastruktur serta kontribusi bagi pengembangan kebijakan di masa depan.

Analisis data dilakukan dengan cara mengelompokkan dan menyusun data dalam bentuk narasi untuk menggambarkan peran dan kontribusi ppn dalam pembangunan infrastruktur serta dampaknya terhadap perekonomian. Selain itu, analisis ini juga menyoroti kebijakan pengalokasian penerimaan ppn untuk pembangunan publik di Indonesia. Tantangan pengumpulan pajak seperti basis pajak yang tinggi dan kepatuhan wajib pajak juga dianalisis sebagai bagian dari hambatan yang harus diatasi untuk mengoptimalkan peran PPN.

Data yang digunakan berasal dari artikel ilmiah dan jurnal yang membahas perpajakan dan pembangunan infrastruktur di Indonesia, laporan resmi pemerintah dan lembaga terkait mengenai penerimaan pajak dan alokasi anggaran infrastruktur, studi kasus proyek infrastruktur yang didanai dari penerimaan ppn statistik dan data sekunder dari direktorat jenderal pajak, badan pusat statistik, dan sumber terpercaya lainnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PPN telah menjadi salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia, dengan kontribusinya yang sangat besar terhadap total penerimaan pajak. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), pada tahun 2023, PPN menyumbang lebih dari 30% dari total penerimaan pajak negara. Pendapatan ini digunakan untuk membiayai berbagai sektor publik, dengan salah satu prioritas utamanya adalah pembangunan infrastruktur.

Sebagai contoh, dana dari ppn telah digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jaringan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang berperan penting dalam meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempermudah distribusi barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai membantu mengurangi biaya logistik, memperlancar arus perdagangan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Penerimaan pajak, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), berperan penting dalam mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan produktivitas ekonomi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi salah satu hambatan bagi daya saing ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, pembangunan jalan tol dan pelabuhan mempermudah distribusi barang ke seluruh wilayah Indonesia, yang pada gilirannya menurunkan biaya transportasi dan mempercepat arus barang. Selain itu, pembangunan infrastruktur menciptakan lapangan kerja, baik langsung maupun tidak langsung, yang membantu mengurangi tingkat pengangguran. Proyek infrastruktur juga membuka peluang investasi baik domestik maupun asing, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Selain dampak ekonomi jangka pendek, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan juga mendorong stabilitas ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan efisiensi pasar.

Dampak dari penelitian ini bagi bidang terkait sangat signifikan. Pertama, penelitian ini dapat membantu meningkatkan efektivitas penggunaan PPN dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan mengidentifikasi strategi untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa dana pajak digunakan secara efektif dan efisien untuk proyek-proyek infrastruktur yang membutuhkan.

Kedua, penelitian ini berfokus pada pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan memberikan rekomendasi untuk kebijakan perpajakan yang mendukung proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan, penelitian ini dapat membantu memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan. Hal ini sangat penting dalam konteks pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Ketiga, penelitian ini berpotensi berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan memperkuat hubungan antara pajak dan pembangunan infrastruktur, penelitian ini dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan aktivitas ekonomi di sekitar proyek-proyek infrastruktur. Hal ini akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.

Terakhir, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan perpajakan yang lebih efektif dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Dengan memastikan bahwa sumber daya yang ada dapat dimanfaatkan

secara optimal, penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur publik di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur yang ada tetapi juga memberikan kontribusi praktis bagi pengembangan kebijakan yang lebih baik di masa depan.

Untuk mengatasi permasalahan tentang peran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam meningkatkan pembangunan infrastruktur publik, beberapa pendekatan dapat digunakan. Pertama, peningkatan kepatuhan pajak dapat dilakukan melalui program edukasi dan kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak dalam pembangunan infrastruktur. Kedua, reformasi sistem perpajakan dapat dilakukan dengan mengoptimalkan sistem perpajakan menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ketiga, kolaborasi multi-stakeholder sangat penting dengan meningkatkan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam pembangunan infrastruktur.

Pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada setiap transaksi barang dan jasa, memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara. Berdasarkan data direktorat jenderal pajak (DJP), ppn berkontribusi sekitar 30% dari total penerimaan pajak negara pada tahun 2023. Pendapatan yang berasal dari ppn digunakan untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur yang mencakup sektor transportasi, energi, dan infrastruktur publik lainnya yang esensial bagi perekonomian Indonesia.

Sosialisasi pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, termasuk dalam pelaporan dan pembayaran ppn. Proses sosialisasi yang efektif membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan dan perubahan regulasi, seperti penerapan e-faktur versi terbaru yang disosialisasikan secara rutin oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Sosialisasi yang baik juga mendorong transparansi dan meminimalkan kesalahan dalam pelaporan pajak. Sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan dan pembayaran ppn. Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, seperti keterlambatan pelaporan atau penggunaan faktur pajak fiktif, dapat meningkatkan disiplin dan mengurangi praktik penghindaran pajak. Hal ini penting agar penerimaan ppn dapat optimal dan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi berperan strategis dalam optimalisasi sistem pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kehadiran e-Faktur versi terbaru yang terintegrasi secara digital memungkinkan Pengusaha Kena Pajak (PKP) melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Masa PPN secara elektronik, sehingga dapat meningkatkan efisiensi administrasi, mengurangi biaya kepatuhan, dan mempercepat proses pelaporan perpajakan. Selain itu, teknologi blockchain mulai diterapkan sebagai solusi untuk meningkatkan transparansi, keamanan, dan efisiensi pelaporan PPN. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi secara real-time, mengurangi risiko kecurangan seperti faktur pajak fiktif, serta menyederhanakan proses administrasi perpajakan (Saputril & Nursita, 2024). Penggunaan teknologi cloud juga mendukung kemudahan akses pelaporan pajak melalui perangkat mobile, meningkatkan kenyamanan dan kepatuhan wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki peran yang sangat penting dalam mendanai pembangunan infrastruktur *public* di Indonesia. Kontribusinya yang besar terhadap penerimaan negara memberikan ruang bagi pemerintah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, serta memajukan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan alokasi penerimaan PPN untuk pembangunan *public* telah berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Namun, untuk mengoptimalkan potensi PPN dalam mendanai pembangunan infrastruktur, penting bagi pemerintah untuk terus melakukan reformasi dalam *system* perpajakan, meningkatkan kepatuhan pajak, serta memastikan bahwa dana PPN digunakan secara efisien dan *transparan*. Selain itu, pengelolaan infrastruktur yang berkelanjutan juga perlu diperhatikan untuk memastikan dampak jangka panjang terhadap perekonomian nasional.

6. SARAN

Meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pajak, khususnya PPN, serta manfaat langsungnya dalam pembangunan infrastruktur publik, guna meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran. Melakukan reformasi sistem perpajakan dan pengelolaan anggaran dengan meningkatkan transparansi,

akuntabilitas, dan efisiensi penggunaan dana pajak, termasuk pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pajak dan anggaran. Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang lebih inovatif dan berkelanjutan. Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan dan proyek infrastruktur untuk memastikan tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Menyiapkan langkah mitigasi terhadap dampak kenaikan PPN terhadap biaya proyek infrastruktur, seperti relokasi anggaran dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. Untuk Penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran (*mixed methods*) guna menguji secara empiris hubungan antara penerimaan PPN, belanja infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi menggunakan data time series atau panel.

7. REFERENSI

- Adha Gantara, W., Sadino, & Lutfi, A. (2024). Kajian Yuridis Asset Recycling BUMN (Studi Kasus Asset Recycling PT Hutama Karya (Persero). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 359–372. <https://doi.org/10.31933/yf4s4x68>
- Adolph, R. (2016). *Ekonomi Publik Teori Penerapan Kebijakan Fiskal*.
- Afriyana, L. (2023). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2021. *Elastisitas - Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.29303/e-jep.v5i1.70>
- Aulia, A., Maisaroh, S., Ananta, A. F., & Pangestoeti, W. (2025). *Dampak Kenaikan PPN 12 % terhadap Pendapatan Negara dan Kesejahteraan Masyarakat*. 42.
- BPIW PUPR. (2022). Pembangunan Infrastruktur PUPR Sebagai Pendorong Kebangkitan Ekonomi Nasional Untuk Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat Pasca Pandemi Covid-19. *Sinergi BPIW*, September.
- E. Davina and R. Hal, “1, 2 1,2,” *Pengaruh Perubahan Peratur. Pajak Pertambahan Nilai Dan Sos. Perpajak. Terhadap Kepatuhan Wajib*, vol. 11, no. 1, pp. 1–11, 2025
- F. Majid, H. S. Sholikhah, and S. Lintang, “Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Masyarakat Di Indonesia,” *J. Mhs. Akunt. UNITA*, vol. 2, no. 2, pp. 92–97, 2023
- Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). *Dampak Kenaikan Tarif PPN terhadap Inflasi dan Daya Beli Masyarakat Indonesia*. 9(2), 67–78.
- Hajatina, & Hasanah, U. (2024). *ANALISIS DAMPAK KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) TERHADAP PERILAKU KONSUMSI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA*. 3(2), 36–51.
- Harjowiryo, M. (2019). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeroran pajak. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 4(3), 220–234. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i3.156>
- Hendra Andy Mulia Panjaitan, Sri Mulatsih, & Wiwiek Rindayati. (2020). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Pembangunan*, 8(1), 43–61. <https://doi.org/10.29244/jekp.v8i1.29898>
- Hermawan, A. D. (2024). *KENAIKAN TARIF PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) 12%: ANALISIS DAMPAKNYA TERHADAP APBN DAN PEREKONOMIAN INDONESIA*. 2(12).
- Hidayat, & Ramadhani. (2021). *Analisis Pengaruh Tingkat Kepatuhan Pajak dan Jumlah Tenaga Kerja Formal terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia*. 6(1), 1–22.
- Infrastruktur Nasional di Era Digital,” *Equiv. J. Ilm. Sos. Tek.*, vol. 5, no. 2, pp. 202–207, 2023, doi: 10.59261/jequi.v5i2.160.
- Iqbal, M., Rifin, A., & Juanda, B. (2019). Analysis of Infrastructure Effect on Disparity Economic Development Area in Aceh Province. *Totaloka*, 21(1), 75–84
- Kementerian Keuangan. (2022). ABPN Kita Kinerja dan Fakta Kaleidoskop 2021. *Kementerian Keuangan Republik Indonesia*, 1–132. <https://www.kemenkeu.go.id/apbnkita>
- Khairuna, W. R., Harahap, A. F., Amalia, D. D., Wahyuni, F., & Manurung, G. S. (2024). *Pengaruh Program Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap*. 3(2), 31–38
- Larosa, W. R. M., & Halawa, A. (2024). *Analisis strategi optimalisasi penerimaan pajak di sektor ekonomi informal*. 01, 15–19.
- M. A. R, N. G. W. R, and T. Sendjaja, “Menelisis Regulasi PPN Pasal 16D pada KPBU: Membongkar Implikasi

- Perpajakan Penyerahan Aset Infrastruktur,” *Menelisis Regulasi PPN Pasal 16D pada KPBU Membongkar Implikasi Perpajak. Penyerahan Aset Infrastruktur*, vol. 2024, pp. 1–14, 2024.
- Ollivaud, P. (2017). *Improving the allocation and efficiency of public spending in Indonesia* (OECD Economics Department Working Papers No. 1381). OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/528dc615-en>
- Podungge, S., Sudirman, Sofhian, & Ajuna, L. H. (2024). *Efek kenaikan ppn di indonesia*. 5, 121–130.
- Prasetyo, & Firdaus. (2021). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>
- Purwitasari, A., Mutafarida, B., & Yuliani. (2024). Urgensi Pajak dalam Mendorong Pembangunan Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 656–666. <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1584>
- Rindayati, W., Mulatsih, S., & Panjaitan, H. A. M. (n.d.). Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 52–62. <https://doi.org/10.30640/jmcbus.v1i1.483>
- Rukmini, S. B. (2016). Peranan Pajak Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kabupaten Trenggalek. *Dewantara*, 2(2), 204–219
- Saputril, L. N., & Nursita, M. (2024). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, modernisasi perpajakan, dan penerapan self assessment system terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak*. 09(September).
- Simamora, S. I., Sinaga, E. D., Manik, E., Sebayang, E. M. G., & Matondang, K. (2024). Peran Pajak dalam Pembangunan Infrastruktur di Indonesia: Analisis Melalui Kajian Literatur. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 45–56
- Slamet, K., & Ramadhani, S. P. (2020). Bunga Rampai Keuangan Negara 2020: Kontribusi Pemikiran Untuk Indonesia. In *Politeknik Keuangan Negara STAN*.
- Tobing, S. Y. L. (2015). PPN. *Galang Tanjung*, 2504, 1–9.
- W. Kustiawan, A. A. Hasibuan, N. Lubis, M. F. Fayrozi, and M. Maisarah, “Dampak Positif dan Negatif Pembangunan Infrastruktur Terhadap.” Mendeley Bibliography CSL BIBLIOGRAPHY Khairuna, W. R., Harahap, A. F., Amalia, D. D., Wahyuni, F., & Manurung, G. S. (2024). *Pengaruh Program Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Terhadap*. 3(2), 31–38
- Warta Fiskal. (2022). Mendorong Inklusi Keuangan UMKM. *Badan Kebijakan Fiskal*, 1–46
- Wibowo. (2023). PAJAK PENGHASILAN DI INDONESIA (PERATURAN, PERHITUNGAN DAN UPAYA PENINGKATAN POTENSI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN) DAN KAITANNYA DENGAN INVESTASI DI INDONESIA. *Fakultas Ekonomi: Universitas Jambik*, 1, 237.
- World Bank. (2020). *Kajian Belanja Publik Indonesia: Belanja untuk Hasil yang Lebih Baik*. 1–393. www.worldbank.org/id
- Yuniawaty, Y. (2025). *Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dikaitkan Dengan Kemanfaatan Hukum*. 8(4), 974–985